

PERSETUJUAN QANUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN (APBK)		
2025		
DPRK BENER MERIAH NOMOR. 10/KPTS/DPRK/4 HLM		
PERSETUJUAN QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN (APBK) BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2025, PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN (APBK) BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2025		
ABSTRAK	-	Bahwa Rancangan Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2025 yang diajukan oleh Tim Anggaran Eksekutif, setelah melalui beberapa tahapan pembahasan oleh Badan Anggaran DPRK Bener Meriah telah memenuhi persyaratan untuk disetujui menjadi Qanun.
DASAR HUKUM	-	Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 dan telah dirubah dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 pasal 149 ayat (1), Undang-undang Nomor 44 tahun 1999, Undang-undang Nomor 41 tahun 2003, Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018, perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020, Buku Rancangan Qanun Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2025, Buku Rancangan Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2025, Pendapat Badan Anggaran Tanggal 20 Agustus 2024, Pendapat Akhir Fraksi Tanggal 21 Agustus 2024
MATERI POKOK	-	Menetapkan Pertama menyetujui Rancangan Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2025, Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2025, Kedua Jumlah Pendapatan Belanja dan Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2025, ketiga Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Bener Meriah untuk menjadi Pedoman dalam pelaksanaan.
CATATAN	-	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 21 Agustus 2024